

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan topik yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini, maka perlu didukung dari penelitian-penelitian terdahulu yang membahas penelitian yang sejenis. Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu dalam bentuk artikel jurnal dan karya ilmiah lainnya sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan topik penelitian yang dikaji. Penelitian yang pertama berjudul “*E-waste it wisely: lessons from Africa*” yang diterbitkan dengan berbentuk *case study* disusun oleh Thomas Maes dan Fiona Preston-Whyte dan dipublikasikan dalam *Springer Nature Applied Sciences Journal* pada tanggal 5 Februari 2022. Penelitian ini mengkaji tentang pemrosesan limbah elektronik di kawasan Afrika secara keseluruhan.

Sebelum tahun 2012, Nigeria dan Tiongkok menerima sebagian besar transportasi lintas batas global limbah elektronik. Hal ini berubah pada tahun 2011 ketika Tiongkok memperkenalkan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan daur ulang dan pembuangan limbah elektronik. Selama dekade terakhir, pengangkutan limbah elektronik ilegal ke negara-negara Afrika, seperti Mesir, Ghana, Kenya, Nigeria, Senegal, dan Tanzania, mendapat perhatian lebih dalam berita internasional. Perkembangan yang pesat dalam industri manufaktur elektronik di tingkat global, bersamaan dengan tidak adanya *action plan* di

negara-negara Afrika serta kurangnya infrastruktur untuk pengelolaan limbah elektronik yang tepat dan berkelanjutan, telah menyebabkan limbah elektronik berkembang menjadi masalah serius di kawasan Afrika.

Pergerakan lalu lintas limbah elektronik bersifat dinamis, bereaksi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan regulasi. Pendekatan yang terkoordinasi, regional dan global, diperlukan dalam mengatasi limbah elektronik. Melihat aliran limbah elektronik ke Afrika, Konvensi Basel kurang memiliki penegakan praktis. Selain itu pergerakan aliran limbah elektronik di kawasan terutama menyoroti impor limbah elektronik ke Agbogbloshie, Ghana melalui Afrika Selatan, Tunisia, dan Nigeria, penegakan Konvensi Bamako juga dapat ditingkatkan. Tidak adanya infrastruktur *e-waste* dan undang-undang *e-waste* adalah beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya pengelolaan *e-waste* di Afrika.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan setelah mempelajari dan membaca informasi terkait penelitian ini, penulis menemukan bahwa persamaan dari penelitian sebelumnya yang berjudul "*E-waste it wisely: lessons from Africa*" terletak pada adanya aktivitas ekspor limbah elektronik di kawasan Afrika yang didorong oleh faktor kemiskinan, pengangguran, dan kebutuhan sosial ekonomi di Afrika, serta desain sektor publik dan swasta secara global. Teknologi pengolahan limbah elektronik yang tersedia secara global belum tentu sesuai atau layak secara ekonomi di Afrika. Perbedaan terhadap penelitian ini yaitu lebih berfokus pada kebutuhan untuk menciptakan sistem "penambangan perkotaan" yang efisien, efektif, dan bersih di Afrika. Selain itu dikombinasikan dengan tujuan untuk memulihkan bahan dari limbah elektronik, memprosesnya di Afrika sehingga

sumber daya terutama logam tidak diekspor keluar dari Afrika untuk pemrosesan nilai yang meningkat di tempat lain. Dengan demikian, kegiatan ini mampu melestarikan sumber daya, mengendalikan polusi sambil menciptakan lapangan kerja dan kekayaan untuk Afrika.

Penelitian selanjutnya adalah “*E-Waste Disposal Effects on the Aquatic Environment: Accra, Ghana*” yang disusun oleh Jingyu Huang et all yang merupakan kolaborasi dari para ahli asal Hohai University dan Kwame Nkrumah University of Science and Technology. Penelitian ini dipublikasikan di *Reviews of Environmental Contamination and Toxicology* pada tahun 2014. Artikel ini membahas tentang bagaimana efek dari pembuangan limbah elektronik terhadap kondisi lingkungan di Ghana, terutama di wilayah Accra.

Di negara-negara berkembang, termasuk Ghana, sampah elektronik secara rutin dibongkar oleh pekerja yang tidak terlindungi yang menggunakan metode dan alat yang belum sempurna. Setelah dibongkar, komponen limbah elektronik sering disimpan dalam tumpukan besar di luar ruangan. Metode pemrosesan dan penyimpanan ini membuat pekerja dan penduduk setempat terpapar beberapa logam berat dan bahan kimia organik yang ada dalam komponen limbah elektronik. Jumlah limbah elektronik yang dibuang di Ghana meningkat setiap tahunnya sekitar 20.000 ton. Lingkungan perairan setempat memiliki potensi risiko tinggi, karena tumpukan komponen limbah elektronik yang disimpan di luar secara rutin basah kuyup atau tergenang oleh air hujan, menghasilkan limpasan dari lokasi penyimpanan ke saluran air setempat. Sampel air dan sedimen

menunjukkan bahwa kontaminan terkait limbah elektronik telah memasuki saluran air Ghana.

Penelitian kedua yang berjudul “*E-Waste Disposal Effects on the Aquatic Environment: Accra, Ghana*” memiliki fokus yang sama dengan topik penulis yaitu bagaimana volume limbah elektronik yang semakin berkembang pesat di seluruh dunia menjadikan limbah elektronik yang semakin banyak dibuang melalui ekspor dari negara maju ke negara berkembang, salah satunya adalah kondisi di Ghana. Perbedaannya terhadap penelitian ini adalah penulis mengkaji aktivitas ekspor *e-waste* menuju Nigeria. Penelitian ini lebih berfokus pada konsekuensi potensial dari pembuangan limbah elektronik tersebut, bagaimana limbah elektronik diproses di Ghana, dan nasib kontaminan kimia limbah elektronik selama daur ulang dan penyimpanan. Selain itu, penelitian ini juga membahas dampak buruk prospektif dari kontaminan terkait limbah elektronik terhadap kesehatan dan kehidupan akuatik di hilir dari fasilitas pembuangan limbah elektronik besar di Accra, Ghana.

Penelitian selanjutnya berjudul “*Impor Limbah Elektronik (E-Waste) Nigeria dari Inggris 2005-2009*”. Artikel jurnal ini merupakan karya dari Khoirul Annisak HS dan dipublikasikan di Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FISIP Universitas Riau pada Februari 2015. Penelitian ini merupakan kajian yang membahas tentang impor limbah elektronik Nigeria, dengan motif keuntungan dari impor tersebut. Dalam hal ini pembuangan limbah elektronik yang diperdagangkan, memunculkan isu-isu baru dalam hubungan internasional, yaitu perdagangan limbah elektronik, lingkungan serta konvensi. Secara global

permasalahan ini menjadi perhatian bagi dunia internasional tersebut dikarenakan tingginya kasus pembuangan limbah elektronik dari negara maju ke negara-negara berkembang beserta polusi limbah-limbah berbahaya yang dihasilkan oleh kegiatan industri negara-negara OECD (*Organization for Economic Cooperation & Development*).

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini dapat diklasifikasi menjadi beberapa poin. *Pertama*, dengan kondisi Nigeria yang miskin membuat negara melakukan perdagangan limbah elektronik, terutama bagi daerah pedesaan yang tidak memiliki pekerjaan, serta rendahnya keterampilan yang mereka miliki, mendorong masyarakat desa untuk mencari uang dengan cara mengumpulkan limbah elektronik bekas kemudian menjualnya. *Kedua*, Mengingat potensi keuntungan yang tinggi ada kemungkinan bahwa pasar untuk limbah berbahaya yang melibatkan negara berkembang dan negara-negara industri baru akan terus menjadi menarik dan tersedia bahkan bahwa limbah akhirnya dapat dilihat sebagai komoditas penting perdagangan bahkan pada saat gagasan tentang larangan limbah berbahaya di buat tetap melakukannya. *Ketiga*, jika kebijakan yang diambil oleh Nigeria dengan tujuan keuntungan ekonomi dan sosial, yaitu berupa dari ekonomi yaitu kontribusi untuk APBN sebagian besar toko dan bengkel yang terletak di kluster perbaikan utama taat pada berbagai jenis pajak yang harus dibayar kepada pemerintah daerah dan pemerintah negara bagian Lagos, ini mencakup pajak perusahaan, pajak penghasilan dan biaya untuk izin perdagangan.

Penelitian yang berjudul “*Impor Limbah Elektronik (E-Waste) Nigeria dari Inggris 2005-2009*” ini sama-sama berfokus tentang impor limbah elektronik

Nigeria dengan motif keuntungan dari impor tersebut. Adanya masalah limbah elektronik dalam dunia internasional telah diatur yaitu berupa Konvensi Basel, serta adanya undang-undang di kedua negara tersebut mengenai limbah elektronik, namun pada akhirnya mereka melanggar peraturan tersebut, sehingga merubah kebijakan tersebut dengan mengutamakan keuntungan ekonomi, sosial, bagi Nigeria dan masyarakat sosial, tanpa menghiraukan kerugian yang didapat.

Penelitian Selanjutnya adalah “*E-waste recycling in Africa: risks and opportunities*”. Penelitian ilmiah ini disusun oleh Asante et all yang merupakan kolaborasi para peneliti dari CSIR Water Research Institute, Green Advocacy Ghana, dan peneliti dari Prefectural University of Kumamoto. *Paper* ini dipublikasikan di *Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry* pada tahun 2018.

Penelitian ini mengkaji bagaimana limbah elektronik (*e-waste*) dihasilkan dalam jumlah yang sangat besar di seluruh dunia, dan ini telah menjadi isu lingkungan global karena cara penanganannya, terutama di negara-negara berkembang. Afrika tidak diragukan lagi adalah ekonomi dengan pertumbuhan tercepat dibandingkan benua lain, dan hal ini mengakibatkan peningkatan impor barang-barang elektronik dan listrik dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Namun, karena infrastruktur yang tidak memadai untuk pengelolaan limbah elektronik dan tidak ditegakkannya undang-undang, banyak sekali zat berbahaya yang dilepaskan karena cara mentah limbah elektronik didaur ulang dan dapat menimbulkan risiko bagi manusia dan lingkungan.

Penelitian selanjutnya berjudul “*E-waste recycling in Africa: risks and opportunities*” lebih berfokus pada peluang berlimpah bagi pemulihan logam mulia untuk industri, peluang kerja dan manfaat ekonomi bagi pengumpul limbah elektronik, membantu membersihkan lingkungan, perbaikan untuk penjualan peralatan elektronik dan listrik murah, manfaat logam yang dipulihkan dibandingkan penambangan mineral, antara lain. Persamaan penelitian ini dengan topik yang dikaji kali ini yaitu pengelolaan limbah elektronik menjadi masalah di Afrika karena meningkatnya produksi global peralatan elektronik dan listrik, kurangnya rencana tindakan yang jelas oleh pemerintah Afrika tentang penanganan limbah elektronik, dan tidak adanya infrastruktur untuk pengelolaan limbah elektronik yang sesuai.

Penelitian selanjutnya berjudul “*Eco-Imperialism: The Global North’s Weapon of Mass Intervention*”. Artikel jurnal ini merupakan karya dari Soomin Lim dan Shirley Steven yang dipublikasikan pada Januari 2009. Penelitian ini mengkaji isu gerakan radikal lingkungan telah menyebabkan tren berbahaya dalam politik global, *Eco-Imperialisme*. Di bawah kedok "perubahan iklim" dan "perlindungan sumber daya", negara maju global Utara berusaha untuk mengontrol, baik secara politik maupun praktis, sumber daya dunia yang kurang berkembang. Para penyusun penelitian ini berpendapat bahwa masyarakat terpelajar dan berpengetahuan harus menyadari sifat sebenarnya dari upaya ini, dan menempatkan kesejajaran antara imperialisme masa lalu dan *Eco-Imperialisme* saat ini.

Penelitian selanjutnya yang berjudul “*Eco-Imperialism: The Global North’s Weapon of Mass Intervention*” lebih berfokus pada bentuk eksploitasi negara-negara maju terhadap negara-negara selatan dengan menggunakan *moral superiority* di mana negara-negara maju merasa lebih berhak mengatur negara-negara selatan berdasarkan prinsip dan nilai mereka. Secara tidak langsung, negara-negara maju melanggar kedaulatan negara-negara selatan dengan prinsip dan nilai Barat. Hal ini kemudian membatasi pembangunan di negaranegara berkembang karena standar yang dibuat oleh negara-negara maju mengenai apa saja yang baik bagi lingkungan dan apa saja yang dapat berkontribusi dalam perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia. Negara-negara maju dianggap melanggar kedaulatan negara-negara Selatan dengan memaksakan nilai-nilai yang mereka anut.

Penelitian selanjutnya adalah “*Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE): Flows, Quantities, and Management—A Global Scenario*”. Artikel ini merupakan karya dari Mihai et all yang diterbitkan dalam *Electronic Waste Management and Treatment Technology* pada tahun 2019. Dalam artikel ini, geografi arus limbah elektronik di tingkat global dan nasional terlihat berdasarkan data statistik limbah dan kartografi tematik. Praktik pengelolaan limbah peralatan listrik dan elektronik (WEEE) diperiksa untuk setiap wilayah geografis utama masing-masing: Eropa, Amerika Utara, Amerika Latin dan Karibia, Amerika Selatan, Afrika, Asia, dan Oseania.

Penelitian selanjutnya adalah “*Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE): Flows, Quantities, and Management—A Global Scenario*” sama-sama

membahas bagaimana ancaman polusi dan kesehatan masyarakat yang terkait dengan praktik pengelolaan limbah elektronik yang tidak tepat merupakan masalah lingkungan yang penting, terutama di negara berkembang. Kegiatan pembangkitan, pengumpulan, pengolahan, daur ulang, dan pemulihan WEEE dianalisis dalam setiap wilayah geografis. Sektor formal dan informal diselidiki lebih lanjut, membahas kesenjangan dan prospek yang berbeda dalam pengembangan sistem pengelolaan limbah elektronik yang berkelanjutan di negara berkembang dan maju.

Penelitian terakhir adalah "*The Global Transformation of Materials and the Emergence of Informal Urban Mining in Accra, Ghana*". Artikel ini merupakan hasil kolaborasi antara Richard Grant peneliti dari University of Miami dan Martin Oteng-Ababio peneliti asal University of Ghana yang diterbitkan *Africa Today* pada tahun 2016. Narasi tentang pengiriman global perangkat elektronik bekas ke Afrika tidak lengkap karena hanya berfokus pada pembuangan perangkat di akhir masa pakainya dan bahaya kesehatan dan lingkungan bagi penduduk lokal.

Memanfaatkan kerja lapangan dan wawancara di Accra, Ghana, dengan pemroses limbah elektronik, pendaur ulang dan pengekspor barang bekas, industri lokal, dan petugas Layanan Bea Cukai dan Pencegahan Ghana, serta analisis data perdagangan bea cukai, Grant dan Oteng-Ababio mengungkap perkembangan tersebut tentang penambangan logam berharga perkotaan informal dari barang elektronik bekas, sebuah praktik yang mempertanyakan oposisi ruang kota-tambang konvensional, konsumsi-produksi, dan sumber daya limbah.

Penambangan perkotaan adalah konsep heuristik penting untuk memahami tempat Accra dalam ekonomi politik global dan untuk membuat dan menerapkan kebijakan untuk meningkatkan mata pencaharian pekerja limbah elektronik informal di Ghana dan di tempat lain.

Penelitian terakhir yang berjudul *“The Global Transformation of Materials and the Emergence of Informal Urban Mining in Accra, Ghana”* lebih berfokus pada memanfaatkan kerja lapangan di Accra, Ghana, dengan pemroses limbah elektronik, pendaur ulang dan pengeksport barang bekas, industri lokal, dan petugas Layanan Bea Cukai dan Pencegahan Ghana, serta analisis data perdagangan bea cukai. Grant dan Oteng-Ababio mengungkap perkembangan tersebut tentang penambangan logam berharga perkotaan informal dari barang elektronik bekas, sebuah praktik yang mempertanyakan oposisi ruang kota-tambang konvensional, konsumsi-produksi, dan sumber daya limbah. Penambangan perkotaan adalah konsep heuristik penting untuk memahami tempat Accra dalam ekonomi politik global dan untuk membuat dan menerapkan kebijakan untuk meningkatkan mata pencaharian pekerja limbah elektronik informal di Ghana dan di tempat lain.

2.2 Review Teori

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan landasan dari beberapa teori yang sesuai dengan tujuan penelitian, yang diyakini mampu menjawab pertanyaan dari penelitian yang dilakukan. Beberapa teori yang digunakan akan dipaparkan seperti dibawah ini.

2.2.1 Teori Politik Hijau

Perkembangan Teori Hijau (*Green Theory*) didasarkan pada fakta bahwa manusia merupakan bagian dari alam sehingga turut memiliki implikasi terhadap perilaku politiknya. Maka teori-teori dalam politik juga harus beriringan dengan teori lingkungan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Hijau dalam hubungan internasional menurut pandangan R. Eckersley yang menyatakan bahwa karakteristik politik hijau didefinisikan dalam kerangka Ekosentrisme yang menolak pandangan Antroposentrisme bahwa nilai moral berpusat pada manusia. Pandangan ini memposisikan kebebasan nilai pada ekosistem dan seluruh aspek kehidupan¹⁵.

Para pemikir dalam *Green Thought* memiliki asumsi bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tindakan manusia terhadap lingkungannya dengan adanya kerusakan di lingkungan hidup itu sendiri. *Green Thought* menghadirkan cara pandang yang bersifat holistik dengan melihat hubungan yang erat antara kehidupan manusia dengan ekosistem global dimana pandangan ini memfokuskan pada keharusan untuk memelihara lingkungan hidup demi kelangsungan makhluk hidup. Karakteristik *Green Politics* menurut Eckersley disebut juga dengan Ekosentrisme yang merupakan suatu bentuk penolakan terhadap pandangan dunia Antroposentrisme yang hanya menempatkan nilai

¹⁵ Apriwan. (2011). 'Teori Hijau: Alternatif dalam Perkembangan Teori Hubungan Internasional' *MULTIVERSA Journal of International Studies*, Vol. 2, No. 1, pp. 45, 51-54. Available at: https://www.researchgate.net/publication/344510731_Teori_Hijau_Alternatif_dalam_Perkembangan_Teori_Hubungan_Internasional (Diakses: 7 Februari 2023).

moral atas manusia menjadi suatu pandangan yang memprioritaskan nilai independen atas ekosistem dan seluruh makhluk hidup¹⁶.

Selain itu Eckersley menyatakan bahwa Teori Hijau dalam hubungan internasional dikelompokkan menjadi dua kategori. Pertama, IPE (*International Political Economy*) yang mengkaji analisis alternatif bagi isu-isu ekologi global pada rejim teori. Kedua, Kosmopolitanisme Hijau yang mengatur norma-norma baru bagi keadilan lingkungan dan demokrasi hijau pada seluruh tingkat di pemerintahan.

Penstudi ilmu Teori Lingkungan Kritis seringkali menganggap bahwa dunia menggunakan praktik lingkungan eksploitatif di mana perkembangan ekonomi menyebabkan masalah global, dan degradasi lingkungan tersebut berakibat fatal bagi sebagian orang dan negara yang terjadi karena globalisasi dan ketidaksetaraan. *Environmentalist* berargumen bahwa kapitalisme dan praktiknya merupakan sumber utama dari degradasi lingkungan oleh karena itu beban utama terkait masalah lingkungan global akan diarahkan kepada negara-negara adidaya yang telah jauh lebih lama mengkonsumsi sumber daya alamnya maupun sumber daya negeri lain melalui kolonialisme dalam praktik industrialisme serta institusi-institusi modern yang dianggap sebagai kaki tangan kapitalisme itu sendiri seperti World Bank, IMF, dan WTO. Penataan kembali struktur global ekonomi yang

¹⁶ Rani, F. (2013). 'Perspektif *Green Thought* dalam Paradigma Baru Politik Internasional (Teori dan Praktek)' *Jurnal Transnasional*, Vol. 4, No. 2, pp. 874-877. Available at: <https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/1210> (Diakses: 6 Februari 2023).

berpusar kepada lingkungan hidup serta pelestariannya merupakan tuntutan utama yang disampaikan dalam Teori Politik Hijau.¹⁷

Teori politik Hijau muncul sebagai kekuatan politik yang penting di banyak negara sejak 1970, sejak awal *standing position* dari teori politik global itu sendiri cenderung berlingkup global. Seiring dengan makin maraknya krisis lingkungan membuat politik hijau terus meningkat relevansinya. Meskipun kebanyakan penstudi Teori Politik Hijau menolak globalisasi dan neo liberalisme ekonomi dan memilih untuk mengembalikan otonomi lokal dan komunitas masyarakat adat demi pembatasan konsumsi dan perkembangan ekonomi untuk menghindari efek terburuk dari degradasi lingkungan. Berbagai variasi dari aplikasi *Green Theory* dapat ditemukan di berbagai kalangan aktor negara maupun non-negara. Politik hijau muncul dikarenakan adanya pengetahuan dan kewaspadaan manusia akan pentingnya lingkungan dan hubungan antara umat manusia dan alam di sekitarnya.

Dalam dinamika Teori Hubungan Internasional, teori politik hijau merupakan perspektif alternatif Hubungan Internasional yang mengkritisi perspektif tradisional ketika menghadapi isu-isu spesifik seperti isu lingkungan hidup, yang erat berkaitan dengan isu kemiskinan, kelaparan, akses kesehatan, bahkan belakangan ini UNFCCC mencoba untuk menambahkan isu perempuan dan peperangan yang disebabkan oleh minimnya sumber daya alam yang ada. Isu-isu kosmopolitan yang diangkat oleh perspektif alternatif seperti teori politik hijau merupakan hal yang dianggap melanggar kedaulatan dan tidak terlalu

¹⁷ Gunar, A. 2021. *Critical Approaches to International Relations*. United Kingdom: Brill, hal 236.

diperhatikan oleh pandangan klasik atau tradisional.¹⁸ Nampaknya, ide bahwa manusia mempunyai kewajiban moral terhadap alam yang mempertimbangkan bahwa berbagai macam kehidupan adalah sesuatu yang berharga baik kehidupan manusia maupun spesies lainnya adalah ide yang radikal dan baru dan keluar dari norma-norma umum dalam perspektif Hubungan Internasional.

Konflik lingkungan hidup terjadi karena keterkaitan antara ekologi dan kemasyarakatan di mana yang satu diatur dan dibatasi oleh sistem-sistem natural atau alam yang tidak dapat diganggu gugat, sementara yang lainnya diatur oleh nilai-nilai sosial dan politik yang dibentuk oleh kepentingan ekonomi dan perkembangan. Hal yang penting untuk dipahami adalah konflik lingkungan hidup biasanya merupakan masalah cara pengaturan ekosistem. Dalam upaya diplomasi resolusi masalah ini, terdapat tiga komponen utama dalam upaya diplomasi untuk menangani konflik lingkungan hidup, yang sesuai dengan tujuan perkembangan berkelanjutan: perlindungan lingkungan hidup, perkembangan ekonomi, dan keadilan sosial.¹⁹

Fokus utama politik hijau adalah ketidakadilan struktural yang melekat dalam tata politik internasional yang melekat dalam ekonomi kapitalis modern yang tentunya berkaitan dengan Teori Marxis. Selain itu, terdapat juga kritisi politik hijau terhadap negara. Politik hijau menganggap bahwa negara merupakan bagian dinamika masyarakat modern yang menyebabkan krisis lingkungan. Secara umum, teori politik hijau terfokus terhadap penciptaan keadilan. Keadilan yang

¹⁸ Ibid, 256.

¹⁹ Speth, J. 2005. *Global Environmental Challenges: Transition to Sustainable World*. India: Orient Blackswan, hlm. 37.

dimaksudkan adalah adanya perhatian krisis lingkungan yang tidak merata di dunia. Melalui telaahan lebih lanjut kepada wilayah-wilayah yang tidak memiliki kebutuhan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya diharapkan menyadarkan manusia bahwa terdapat ketimpangan sumber daya bagi masyarakat lainnya. Tema dari *Green Theory* dalam hubungan internasional adalah slogan “*Think Globally, Act Locally*” yang menekankan bahwa masalah-masalah sosial ekonomi dan lingkungan global terjadi dalam skala yang melintasi batasan-batasan negara, isu-isu ini hanya bisa direspon dengan baik melalui tindakan lokal dan konstruksi komunitas politik yang berskala lebih kecil.²⁰

Alasan penerapan teori politik hijau dalam penelitian ini adalah pemikiran dari teori tersebut yang menyatakan bahwa masyarakat di negara miskin lebih kesulitan dalam memperoleh kualitas lingkungan hidup yang baik karena masih berorientasi pada aspek ekonomi dalam hidup mereka, sementara negara-negara yang lebih kaya akan mengalami kemudahan karena mereka lebih mapan secara ekonomi sehingga mampu merasakan kualitas lingkungan yang lebih baik²¹.

Teori Politik Hijau merupakan dasar utama yang akan digunakan dalam analisis yang dilakukan dalam tulisan ini. Melalui politik hijau, penulis berharap untuk menggunakan kerangka kerja yang tersedia dalam meninjau kembali apa saja alasan dari adanya aktivitas ekspor limbah elektronik dari Inggris ke Nigeria terhadap kedua belah pihak. Melalui Teori Politik Hijau, analisis terkait dampak-dampak yang ditimbulkan dari aktivitas ekspor limbah elektronik dapat dipahami

²⁰ Browning, G. 2000. *Understanding Contemporary Society (Theories and the Present)*. London: SAGE Publications, hlm 447.

²¹ Goodin, R. 1992. *Green Political Theory*. Cambridge: Polity Press, hlm. 193-194.

dengan lebih mendalam karena fenomena tersebut bertentangan dengan pemikiran utama dari teori politik hijau yang memprioritaskan keberlangsungan lingkungan hidup bersama dibandingkan dengan kepentingan pribadi lainnya seperti ekonomi.

2.2.2 Imperialisme Ekologi (*eco-imperialism*)

Eco-imperialism atau imperialisme ekologi adalah pemikiran yang menjelaskan agenda lingkungan yang dibentuk oleh negara-negara maju untuk melakukan eksploitasi terhadap negara-negara berkembang di bidang lingkungan. Dicetuskan pertama kali oleh Alfred Crosby, *eco-imperialism* diimplementasikan melalui eksploitasi sumber daya di negara lain, adanya transformasi dalam seluruh ekosistem, pergerakan penduduk dan tenaga kerja dalam eksploitasi sumber daya, kondisi lingkungan yang bersifat rentan sehingga memudahkan eksploitasi, hingga pembuangan limbah dari negara-negara pusat ke negara-negara pinggiran²². Imperialisme ekologi dapat mengganggu hubungan berkelanjutan antara manusia dengan lingkungan karena aktivitas pembuangan limbah yang lebih terkonsentrasi dari negara pusat terhadap negara pinggiran.

Sementara menurut Lim Soomin dan Steven Shirley, agenda *eco-imperialism* dilaksanakan dengan memasukkan standar nilai-nilai Barat terhadap kebijakan terkait lingkungan di negara lain sehingga menyebabkan adanya pembatasan dalam pembangunan terutama di negara-negara berkembang. Negara-negara maju dianggap melanggar kedaulatan negara-negara berkembang dengan

²² Crosby, A. 2004. *Ecological Imperialism : The Biological Expansion of Europe*. Second Edition. New York: Cambridge University Press, hlm. 94.

memaksakan standar nilai yang mereka anut²³. Gagasan ini diperkuat oleh Paul Driessen yang menyatakan bahwa imperialisme ekologi dilakukan melalui pemaksaan perspektif mengenai lingkungan yang mengandung standar nilai Barat terhadap negara-negara berkembang²⁴.

Alasan dari penerapan konsep *eco-imperialism* terhadap penelitian ini adalah pemikiran bahwa penjajahan lingkungan terjadi akibat kualitas lingkungan yang berbeda yang menjadi sebuah kesempatan bagi Inggris untuk mengekspor limbah ke negara yang dilabeli sebagai negara berkembang dan kurang peduli masalah lingkungan. Nigeria adalah salah satu contoh negara berkembang yang masih berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan baik secara lingkungan, ekonomi dan sosial budaya. Melalui penjajahan lingkungan yang terjadi, Inggris secara tidak langsung telah memberikan hambatan kepada Nigeria dalam memenuhi pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, negara-negara di Eropa mayoritas merupakan negara maju dan memiliki kualitas lingkungan yang lebih baik dibanding Nigeria.

2.3 Review Konsep

2.3.1 *Cost and Benefit*

Environmental Cost and Benefit Analysis mengacu pada penilaian ekonomi dari kebijakan dan proyek yang sengaja bertujuan untuk meningkatkan penyediaan jasa lingkungan atau tindakan yang mungkin mempengaruhi

²³ Lim, S., & Shirley, S. (2009). Eco-Imperialism: The Global North's Weapon of Mass Intervention. *Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences*, 1(3): 846–860.

²⁴ Driessen, P. 2003. *Eco-Imperialism : Green Power, Black Death*. Merril Press, hlm. 137.

(terkadang merugikan) lingkungan sebagai konsekuensi tidak langsung. *Cost-benefit Analysis* dapat secara singkat didefinisikan sebagai "upaya untuk mengukur keuntungan dan kerugian sosial dari tindakan alternatif dalam hal unit moneter umum. Efek yang tidak terukur, sering dikenal sebagai tidak berwujud, juga harus dijelaskan". Tujuan analisis biaya-manfaat adalah untuk mengukur manfaat bersih bagi masyarakat setelah mengikuti tindakan tertentu. Hal ini dilakukan dengan menilai biaya dan manfaat dari tindakan kebijakan berdasarkan standar umum. Biaya dan manfaat adalah menurut masyarakat secara keseluruhan, dan bukan perusahaan atau rumah tangga tertentu. Oleh karena itu, mereka disebut sebagai Biaya Sosial dan Manfaat Sosial.

Alasan penerapan konsep *cost and benefit* dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis bagaimana keuntungan serta kerugian yang diperoleh baik Inggris maupun Nigeria terhadap aktivitas ekspor limbah elektronik (*e-waste*) ini. Selain itu dapat juga dilakukan perbandingan tentang apakah keuntungan dan kerugian yang didapat seimbang satu sama lain, serta apakah ada salah satu pihak yang lebih diuntungkan dibanding pihak lain.

Konsep *cost and benefit* merupakan dasar utama yang akan digunakan dalam analisis yang dilakukan dalam tulisan ini. Subjek perhatian utama pada *e-waste* adalah dampaknya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, biaya finansial untuk pengumpulan, pemrosesan, dan pembuangan serta konsumsi energi dari proses pemulihan. Pengendalian biaya dan pemulihan limbah elektronik sangat kompleks dan banyak negara (terutama negara berkembang) berjuang untuk mendaur ulang limbah elektronik mereka karena tingginya biaya

yang terlibat. Meskipun ada peluang untuk mendaur ulang limbah elektronik, biaya daur ulang limbah elektronik bisa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan dari bahan yang dipulihkan.

2.3.2 Keseimbangan Lingkungan Hidup

Konsep keseimbangan lingkungan hidup dikembangkan sebagai ide-ide yang mencoba untuk menyatukan seluruh umat manusia dalam pemahaman terkait lingkungan serta rencana jangka panjang yang digunakan untuk mengatur sumber daya yang ada di dalamnya. Topik keseimbangan lingkungan menjadi bagian penting di Konferensi PBB terkait Lingkungan Manusia yang diadakan di Stockholm, Swedia pada Juni 1972.

Keseimbangan Lingkungan Hidup adalah sistem analisis yang berkaitan dan berinteraksi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan di Bumi. Melalui konsep ini sistem ekologi dianggap perlu menemukan titik *equilibrium* stabil di mana ketika sistem tersebut diganggu atau diubah, proses koreksi melalui timbal balik negatif akan terjadi untuk mengembalikan kondisi kepada titik seimbang pada awalnya. Konsep ini seringkali digambarkan sebagai keseimbangan yang lemah dan perlu diperhatikan dengan baik.²⁵

Melalui konsep keseimbangan lingkungan hidup, interaksi antara aktivitas manusia dan pengaruhnya terkait sistem ekologi Bumi dapat diamati. Pemahaman keseimbangan lingkungan hidup dan perlunya menjaga kondisi tersebut untuk

²⁵ Kricher, J. 2009. *The Balance of Nature: Ecology's Enduring Myth*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, hlm. 366.

terus berada di titik *equilibrium* merupakan konsep mendasar yang menjadi bagian penting dari gerakan lingkungan hidup.

2.4 Kerangka Pemikiran

Untuk menjelaskan kerangka pemikiran penelitian yang akan dikerjakan, peneliti akan menyajikan kerangka pemikiran dalam bentuk bagan sebagai berikut :

